



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

(LKjIP) KECAMATAN WERU

TAHUN 2024

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

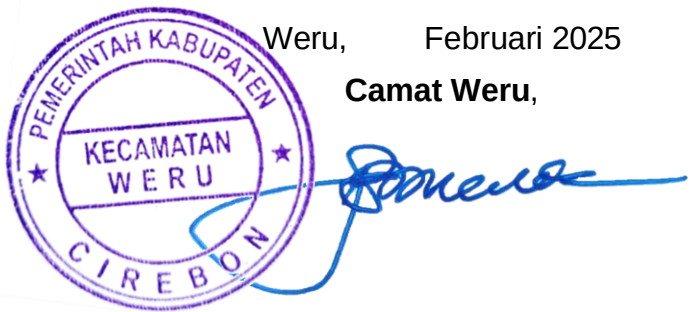
TAHUN 2025

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Weru Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Kecamatan Weru Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Weru, Februari 2025
Camat Weru,



HEVAZI ALDAHARY,S.Sos,M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19781207 200902 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Weru Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Weru yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Weru Tahun 2019-2024, Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Weru yang dihasilkan di Tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik” dengan Indikator kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan. persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah 79,00%

Setelah Tujuan ditetapkan maka sasaran yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Weru dalam mencapai target kinerja ada sebagai berikut:

Sasaran OPD 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikatornya Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 82 %

Sasaran OPD 2: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan, dengan indikatornya Persentase Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan, Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 75 %.

Sasaran OPD 3 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikatornya Indeks Desa Membangun (IDM), Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 0,81 Poin

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Kecamatan Weru juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. Sasaran Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikatornya Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 100 %.
- b. Sasaran Program 2: diantaranya:
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikatornya Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 100 %.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan indikatornya Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilakukan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 100 %.
 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan indikatornya Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan. persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 100 %.
- c. Sasaran Program 3 : Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan indikator Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah 0.00 %, Karna program ini tidak didukung dengan anggaran.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Weru kedepan, sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan Weru harus dipertahankan dan ditingkatkan agar masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Masih belum menguasai Aparatur pemerintah Desa tentang Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes yang tepat waktu.
3. Masih belum tertibnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, baik anggaran Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Alokasi Dana Desa, serta Pendapatan Asli Desa.
4. Masih belum tertibnya penataan Aset Desa.
5. di Kecamatan Weru ada 9 Desa, 2 Desa berstatus Desa Mandiri dan 7 Desa bersatus maju , hal ini menjadikan motivasi untuk Kecamatan Weru agar bisa menaikkan status Desa diwilayah Kecamatan Weru menjadi desa mandiri.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi	1
1.2 Fungsi dan Tugas	5
1.3 Isu-isu Strategis	5
1.4 Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran	6
1.5 Tindaklanjut LHE SAKIP	11
1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	12
BAB 2 PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	14
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	27
2.3 Struktur Program dan Kegiatan	28
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	32
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	35
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	34
3.2.1 Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	40
3.2.2 Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	45
3.2.3 Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	50
BAB 4 PENUTUP	55
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja	55

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan
Tabel 1.4 Jumlah Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
Tabel 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana
Tabel 1.6 Anggaran 20241.7 Rincian Anggaran
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024
Tabel 2.2 Sasaran Strategis
Tabel 2.3 Sasaran Strategi, Program dan Kegiatan
Tabel 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 2.6 Tabel Struktur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja
Tabel 2.8 Perubahan Perjanjian Kinerja
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Kab. Cirebon Tahun 2024
Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja 2024
Tabel 3.5 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
Tabel 3.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja 2024
Tabel 3.8 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja 2024
Tabel 3.11 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran 2024
Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran 2024
Tabel 3.16 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

BAB 1
PENADAHULUAN

Bab 1 Berisi :	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Weru Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.
1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi	
2. Fungsi dan Tugas	
3. Isu Strategis	
4. Dukungan SDM' Sarana Prasarana dan Anggaran	Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) di Indonesia.
5. Tindaklanjut LHE SAKIP	
6. Sistematika SAKIP	

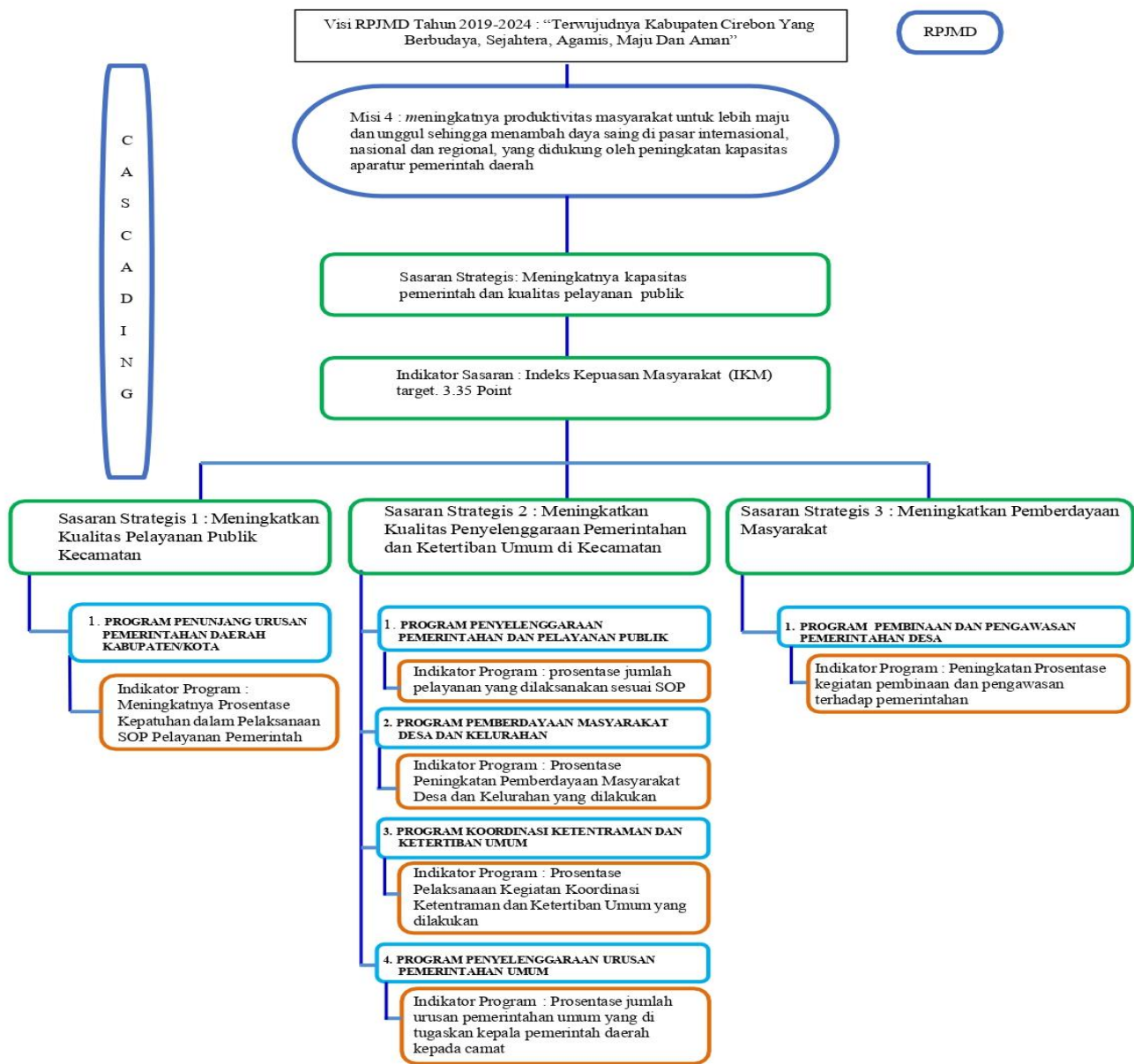
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Weru Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Weru.
2. Mendorong Kecamatan Weru didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Weru untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Weru didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan Weru berpedoman pada Rencana Strategis 2019-2024 dalam menjalankan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Cascading kinerja kecamatan Weru sebagai berikut:

Gambar 1.1 Cascading Kinerja



Sumber: Renstra Perubahan Kecamatan plumbon Tahun 2019-2024

Kecamatan Weru dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

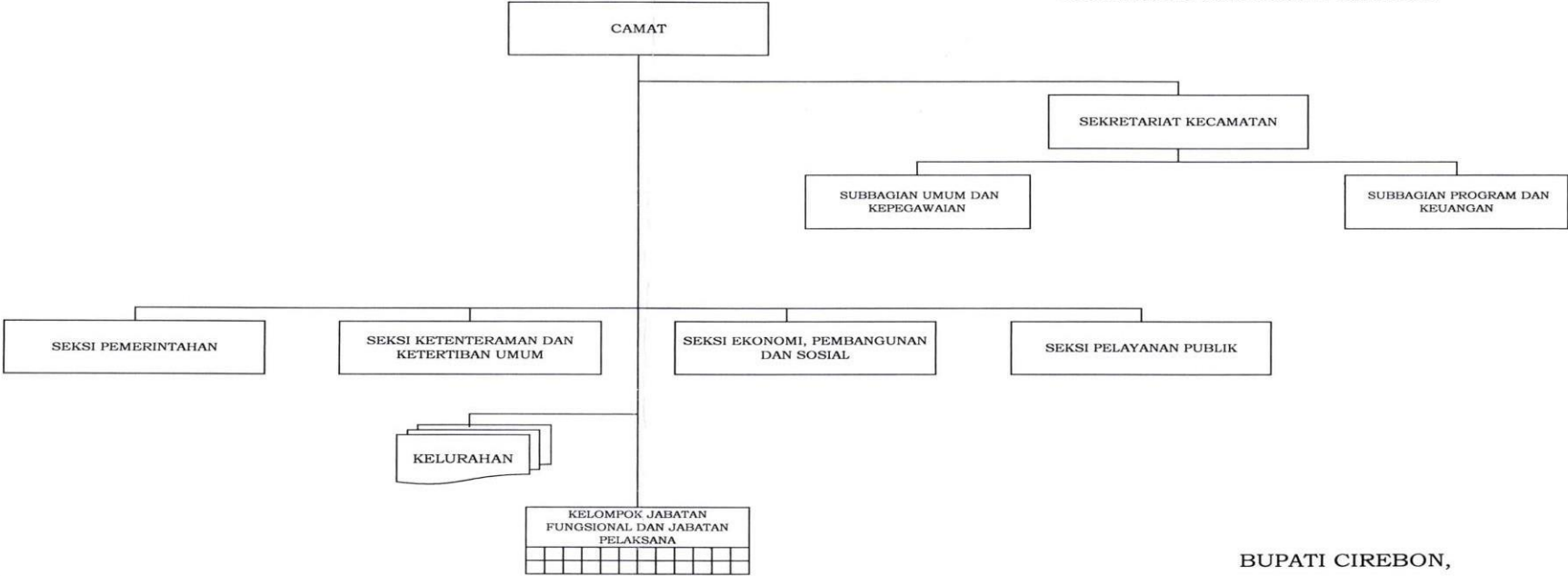
Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dilingkup Kecamatan, antara lain :

Susunan dan struktur organisasi Kecamatan Weru, terdiri atas;

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Sosial
6. Seksi Pelayanan Publik
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
8. Kelurahan / Desa

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 159 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 159

BUPATI CIREBON,
Ttd
IMRON

1.2. Fungsi dan Tugas

Sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai Fungsi dan Tugas sebagai berikut:

1. Fungsi

- 1) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang ada di kecamatan;
 - i. pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;

2. Tugas

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kecamatan Weru, antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau
2. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan
3. Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur desa
4. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas
5. Pemutakhiran data penerima bantuan yang kurang akurat
6. Kurangnya pegawai yang berstatus PNS di Kantor Kecamatan Weru

1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran

Pegawai Kecamatan Weru berjumlah sebanyak 12 orang Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Tabel Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jabatan

Tahun 2024

No	Jabatan	Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
1	Camat	1	S2	1	-
2	Sekretaris Camat	1	S2	-	1
3	Kepala Seksi	4	S1	3	1
4	Kepala Sub Bagian	2	S1	-	2
5	Staf/Pelaksana	4	SMA	3	1
TOTAL		12		7	5

Tabel Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Weru Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Master (S2)	2	1	3
2	Sarjana (S1)	2	3	5
3	Diploma (D3/D4)	-	1	1
4	SLTA	3		3
5	SMP	-	-	-
TOTAL		7	5	12

Tabel Distribusi Tenaga Non PNS Kecamatan Weru Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana (S1)	1	1	2
2	Diploma (D3/D4)	-	-	-
3	SLTA	4	2	6
TOTAL		5	3	8

Tabel Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Pangkat/Golongan di Kecamatan Weru Tahun 2024

NO	GOLONGAN	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	IV B	-	-	-
2	IV A	1	1	2
3	III D	1	1	2
4	III C	2	3	5
5	III B	-	-	-
6	III A	2	-	2
7	II D	-	-	-
8	II C	1	-	1
9	II B	-	-	-
TOTAL		7	5	12

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Weru memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran diantaranya :

Data Sarana/Prasarana Milik Kecamatan Weru Tahun 2024.

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	554.569.892,00	469.266.578,00
1.1	ASET LANCAR	0,00	825.750,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	0,00	825.750,00
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	(0,00)	825.750,00
1.1.11.01.01	Beban Dibayar Dimuka	(0,00)	825.750,00
1.1.11.01.01.0001	Beban Dibayar Dimuka	0,00	825.750,00
	JUMLAH ASET LANCAR	0,00	825.750,00
1.3	ASET TETAP	549.733.972,00	463.604.908,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	428.186.130,00	495.673.130,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	171.437.500,00	266.840.298,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	171.437.500,00	266.840.298,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	171.437.500,00	266.840.298,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	142.076.930,00	137.760.132,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	50.295.530,00	45.978.732,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	36.395.530,00	36.395.530,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	13.900.000,00	9.583.202,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	82.206.400,00	82.206.400,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	31.667.000,00	31.667.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	28.236.400,00	28.236.400,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	1.459.000,00	1.459.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.844.000,00	20.844.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.575.000,00	9.575.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	9.575.000,00	9.575.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.032.600,00	3.032.600,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	3.032.600,00	3.032.600,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	3.032.600,00	3.032.600,00
1.3.02.10	Komputer	111.639.100,00	88.040.100,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	83.006.600,00	66.974.600,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	83.006.600,00	66.974.600,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	28.632.500,00	21.065.500,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	28.632.500,00	21.065.500,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	673.851.000,00	574.051.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	673.851.000,00	574.051.000,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	673.851.000,00	574.051.000,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	574.051.000,00	574.051.000,00
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	99.800.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	33.857.900,00	33.857.900,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	33.857.900,00	33.857.900,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	33.857.900,00	33.857.900,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	13.634.500,00	13.634.500,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	13.396.700,00	13.396.700,00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	6.826.700,00	6.826.700,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(586.161.058,00)	(639.977.122,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(379.370.698,00)	(445.344.114,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(171.437.500,00)	(259.885.262,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(171.437.500,00)	(259.885.262,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(124.179.780,00)	(118.625.482,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(31.751.500,00)	(28.869.480,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(6.417.600,00)	(8.627.202,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(31.667.000,00)	(31.667.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(25.362.580,00)	(22.380.300,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(437.700,00)	(145.900,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(20.266.400,00)	(19.307.600,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(8.277.000,00)	(7.628.000,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(2.382.820,00)	(1.776.300,00)
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(2.382.820,00)	(1.776.300,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(81.370.598,00)	(65.057.070,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(63.634.032,00)	(51.653.630,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(17.736.566,00)	(13.403.440,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(206.790.360,00)	(194.633.008,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(206.790.360,00)	(194.633.008,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(205.792.360,00)	(194.633.008,00)
1.3.07.02.01.0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(998.000,00)	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	549.733.972,00	463.604.908,00
1.5	ASET LAINNYA	4.835.920,00	4.835.920,00
1.5.04	Aset Lain-lain	42.483.400,00	94.291.800,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.5.04.01	Aset Lain-lain	42.483.400,00	94.291.800,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	42.483.400,00	94.291.800,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	42.483.400,00	94.291.800,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(37.647.480,00)	(89.455.880,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(37.647.480,00)	(89.455.880,00)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(37.647.480,00)	(89.455.880,00)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(37.647.480,00)	(89.455.880,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	4.835.920,00	4.835.920,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	554.569.892,00	469.266.578,00
2	KEWAJIBAN	1.618.729,00	2.090.037,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.618.729,00	2.090.037,00
2.1.06	Utang Belanja	1.618.729,00	2.090.037,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.618.729,00	2.090.037,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	1.618.729,00	2.090.037,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.618.729,00	2.090.037,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.618.729,00	2.090.037,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.618.729,00	2.090.037,00
3	EKUITAS	552.951.163,00	467.176.541,00
3.1	EKUITAS	552.951.163,00	467.176.541,00
3.1.01	Ekuitas	(2.087.203.201,00)	(1.840.487.744,00)
3.1.01.01	Ekuitas	467.176.541,00	489.404.789,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	467.176.541,00	489.404.789,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	467.176.541,00	489.404.789,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(2.554.379.742,00)	(2.329.892.533,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(2.554.379.742,00)	(2.329.892.533,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(2.554.379.742,00)	(2.329.892.533,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	2.640.154.364,00	2.307.664.285,00
3.1.03.01	RK PPKD	2.640.154.364,00	2.307.664.285,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	2.640.154.364,00	2.307.664.285,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	2.640.154.364,00	2.307.664.285,00
	JUMLAH EKUITAS	552.951.163,00	467.176.541,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	554.569.892,00	469.266.578,00

Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Weru Tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 4 (empat) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 24 (dua puluh Empat) sub kegiatan. Pada anggaran murni Tahun 2024 Kecamatan Weru mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.407.839.200,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.2.375.604.200,-, yang didalamnya meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 430.101.200,- dan belanja barang dan jasa Rp. 641.748.792,- dan juga terdapat anggaran untuk belanja modal sebesar 32.235.000,- Pada perubahan anggaran Tahun 2024 anggaran belanja Kecamatan Weru menjadi Rp.2.731.339.200,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.2.699.104.200,- yang didalamnya meliputi belanja pegawai sebesar Rp.530.101.200,- dan belanja barang dan jasa Rp.741.748.792,- dan juga terdapat anggaran untuk belanja modal sebesar Rp.32.235.000,-

Adapun rincian realisasi penggunaan anggaran Tahun 2024 dapat di lihat di dalam tabel ini.

Kode rek	Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Bertambah / Berkurang
5.	BELANJA DAERAH	Rp. 2.407.839.200,00	Rp. 2.731.339.200,00	Rp.323.500.000,00
5.1.	BELANJA OPERASI	Rp. 2.375.604.200,00	Rp. 2.699.104.200,00	Rp.323.500.000,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	Rp. 430.101.200,00	Rp. 530.101.200,00	Rp.223.500.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 641.748.792,00	Rp.741.748.792,00	Rp.100.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	Rp.32.235.000,00	Rp. 32.235.000,00	Rp.0
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.32.235.000,00	Rp. 32.235.000,00	Rp.0
	JUMLAH	Rp. 2.407.839.200,00	Rp. 2.731.339.200,00	Rp.323.500.000,00

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Kecamatan Weru, Catatan Hasil Evaluasi Riveu atas Evaluasi Laporan Auntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Weru dengan Nilai 62,20 dengan Kategori baik, namun ada beberapa Saran/Rekomendasi temuan dalam rangka perbaikan kinerja namun sudah ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja.

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Catatan Hasil Reviu Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023 pada Kecamatan Weru	
1.	Dokumen perencanaan harus dipublikasikan melalui website perangkat daerah atau	Dari Hasil Evaluasi AKIP terdapat 9 Saran/Rekomendasi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.
2.	Memperbaiki dokumen cascading dan membuat dokumen pohon kinerja	
3.	Membuat notulen rapat dan daftar hadir terkait IKU Perkin	
4.	Membuat surat usulan promosi atau mutasi yang ditanda tangani pimpinan	
5.	Dokumen pelapolan harus dipublikasikan melalui website perangkat daerah atau	
6.	Dokumen lakip harus memuat menyajikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja	
7.	Dokumen LAKIP harus memuat uraian analisis menyajikan uraian penyebab keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala/permasalahan, langkah antisipasi dan kegiatan / program yang dilaksanakan	
8.	Dokumen LAKIP harus memuat informasi capaian kinerja berkala secara triwulan	
9.	Membuat laporan hasil evaluasi (LHE) LAKIP secara mandiri yang ditanda tangani oleh Camat	

1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Weru Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB 2
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan , Sasaran dan Indikator Kinerja

Bab 2 Berisi :	Memasuki Tahun terakhir periode Renstra 2021-2024, Kecamatan Weru menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Renstra Kecamatan Weru merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Weru dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Weru Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014-2019).
1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	
2. Steragi arah Kebijakan	
3. Struktur Program dan Kegiatan	
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024	

Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah di tuangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019- 2024, berikut ini adalah Tabel Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024:

**Visi Misi Kepala Daerah Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya
dituangkan dalam bagan alur *cascade* RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN									
1	MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG MENJUNJUNG TINGGI DAN MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA, TRADISI DAN ADAT ISTIADAT									
1.1		Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon	Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan Jumlah jenis obyek budaya daerah yang lestari pada tahun berjalan/total jumlah jenis obyek budaya yang ada X 100%	81,00 Persen	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00
1.1.1		Meningkatnya jatidiri dan nilai- nilai luhur masyarakat Cirebon	Jumlah Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif	255,00 Kelompok	232,00	257,00	258,00	259,00	260,00	260,00
2	MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KESEHATAN DAN EKONOMI									

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1		Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,69 Poin	68,75	69,53	70,42	71,01	71,59	71,59
2.1.1		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan	6,71 Tahun	6,92	7,05	7,18	7,31	7,44	7,44
			Harapan Lama Sekolah (HLS) Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur	12,24 Tahun	12,25	12,34	12,44	12,53	12,63	12,63

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1.2		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH) Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak lahir yang dihitung melalui variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup	71,82 Tahun	71,99	72,11	72,24	72,36	72,48	72,48
2.2		Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	9,94 Persen	11,24	11,14	11,04	10,94	10,84	10,84
			Tingkat Penangguran Terbuka (TPT)	10,35 Persen	11,52	11,12	10,70	10,30	9,90	9,90
			PDRB Per Kapita	22,41 Juta	22,43	23,25	24,95	26,78	28,74	28,74
2.2.1		Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	1,50 Persen	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	2,30

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.2.2		Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja $\frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{100\% \text{ Jumlah Angkatan Kerja}}$	58,66 Persen	56,44	57,22	58,03	58,83	59,64	59,64
3	MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG SENANTIASA MENERAPKAN NILAI AGAMA, BUDI PEKERTI, SANTUN, DAN BERETIKA									
3.1		Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Penghitungan terhadap indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat	75,00 Poin	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	90,00
3.1.1		Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	Persentase Penyelesaian Friksi / Gesekan Antar Umat Beragama	78,00 Persen	78,00	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00
4	MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH									

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.1		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Indeks Gini Tingkat kesenjangan pendapatan yang dihitung melalui variabel total pendapatan dan total pengeluaran per penduduk	0,34 Poin	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (PDRB pada tahun berkenaan – PDRB tahun sebelumnya)/ PDRB tahun sebelumnya X 100%	4,86 Persen	-1,08	4,38	4,61	4,84	5,08	5,08
			Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	10.670,00 Ribu Rupiah / Kapita / Tahun	10.342,00	10.606,00	10.891,00	11.198,00	11.529,00	11.529,00
4.1.1		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya	-1,05 Prosen	1,76	1,86	2,08	2,31	2,54	2,54

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya	2,28 Persen	-0,42	3,08	3,74	4,41	5,07	5,07
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya	4,62 Persen	-7,00	5,00	5,25	5,50	5,75	5,75

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya	5,47 Persen	-9,05	4,33	4,63	4,93	5,23	5,23
4.1.2		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Ketersediaan energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100	71,17 Poin	7,44	71,71	71,98	72,25	72,52	72,52
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Konsumsi energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100	91,50 Prosen	93,00	93,10	93,20	93,30	93,40	93,40

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.1.3		Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik) Jumlah sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan), sumber daya air (keberfungsian irigasi dan sungai), keciptakaryaan (cakupan air bersih, limbah domestik dan rumah layak huni) yang baik/total seluruh sarana dan prasarana wilayah X 100%	77,99 Poin	79,89	79,46	80,20	80,93	81,67	81,67

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.1.4		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH) Perhitungan terhadap indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan	52,51 Poin	52,29	52,67	52,76	52,84	52,92	52,92
4.2		Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa	Indeks Reformasi Birokrasi	50,58 Indeks	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
4.2.1		Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks kemandirian fiskal daerah Jumlah PAD/Jumlah pendapatan daerah x 100%	15,71 Poin	16,24	16,79	17,36	17,95	18,56	18,56

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang	3,25 Poin	3,27	3,65	3,35	3,40	3,50	3,50
4.2.2		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	Nilai SAKIP Hasil penilaian dari Kemen-PAN RB	68,00 Poin	70,00	73,00	76,00	79,00	80,00	80,00
			Opini BPK terhadap LKPD Hasil penilaian dari BPK RI	1,00 WTP	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Hasil penilaian dari Korsupgah KPK RI	60,00 Poin	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.2.3		Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Hasil penilaian dari Kemen-PAN RB	2,63 Poin	2,78	2,93	3,08	3,23	3,38	3,38
4.2.4		Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah desa mandiri Jumlah desa mandiri berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun	2,00 Desa	5,00	28,00	49,00	70,00	91,00	91,00
5	MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM UNTUK MEWUJUDKAN KONDUSIVITAS DAERAH GUNA Mendukung terciptanya stabilitas nasional									
5.1		Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Indeks ketertiban dan ketentraman lingkungan	53,05 Persen	53,05	56,09	64,12	70,59	77,50	77,50
5.1.1		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah kasus kriminalitas (kejahatan seksual, penganiyaan, pencurian) + Jumlah kejadian konflik sosial (tawuran antar warga dan/atau antar pelajar)	0,00 Kasus	403,00	398,00	393,00	388,00	383,00	383,00

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.1.2		Menurunnya resiko bencana	Indek resiko bencana Hasil penilaian dari BNPB	165,44 Poin	160,08	154,72	149,36	144,00	138,64	138,64

(Sumber: RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024)

Berangkat dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Weru mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa dengan indikator capaian sasaran Indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Weru yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Weru selama 5 tahun anggaran adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Weru
Tahun 2020-2024.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	Point/Nilai					
1.1.1.		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Point/Nilai	3.55	3.65	81.50	82.00	82.50
1.1.2		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan .	Persen	55,00	60.00	65,00	70,00	75.00
1.1.3.		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	point	0.68	0.68	0.69	0.70	0.71

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran dengan Menyusun Stategi dan arak kebijakn yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Weru Tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam table di bawah :

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN			
MISI : 4 Meningkatnya Produktifitas Masyarakat untuk lebih Maju dan Unggul sehingga menambah daya saing di Pasar Internasional, Nasional dan Regional, yang didukung oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Mengoptimalkan Manajemen Pelayanan Publik Kecamatan	Penyederhanaan Mekanisme Pelayanan dan Standar Pelayanan
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Integrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	Peningkatan Akuntabilitas Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Pelaporan secara Profesional dan Inovatif
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa	Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang baik (good government)

2.3 Struktur Program dan Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2024

Struktur Program dan Kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya Sasaran Kecamatan Weru Tahun 2024 maupun Program dan Kegiatan Pendukung sebagaimana Tabel berikut

Sasaran strategis	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.075.099.700,00	2.398.599.700,00	323.500.000,0
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.541.700,00	1.541.700,00	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	758.700,00	758.700,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	783.000,00	783.000,00	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.948.013.700,00	2.171.513.700,00	223.500.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.945.503.000,00	2.169.003.000,00	223.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.451.100,00	1.451.100,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.059.600,00	1.059.600,00	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.196.300,00	2.196.300,00	-

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.235.000,00	32.235.000,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.443.200,00	32.443.200,00	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.793.200,00	23.793.200,00	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.650.000,00	8.650.000,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.371.200,00	142.371.200,00	100.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.371.200,00	142.371.200,00	100.000.000,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	143.149.400,00	143.149.400,00	-
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.003.400,00	26.003.400,00	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.003.400,00	26.003.400,00	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	24.042.000,00	24.042.000,00	-

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.042.000,00	24.042.000,00	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.	93.104.000,00	93.104.000,00	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	93.104.000,00	93.104.000,00	-
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	90.908.100,00	90.908.100,00	-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	90.908.100,00	90.908.100,00	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90.908.100,00	90.908.100,00	-
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	98.682.000,00	98.682.000,00	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.119.800,00	50.119.800,00	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.119.800,00	50.119.800,00	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48.562.200,00	48.562.200,00	-
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Indonesia	48.562.200,00	48.562.200,00	-
JUMLAH		2.407.839.200,00	2.731.339.200,00	323.500.000,00

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi kepada bawahannya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan Anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Weru pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA	
				Satuan	Target
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	Persen	79,00
1.1.1.		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Persen	82
1.1.2		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	Persen	75
1.1.3		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	Point	0,72

Seiring berjalannya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Weru melakukan perubahan perjanjian kinerja pada Tahun 2024 dikarnakan Kepala Daerah berakhir masa jabatannya pada bulan mei Tahun 2024, dengan demikian maka terjadi pula perubahan perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah pada Tahun 2024 yang dapa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA			REALI SASI
				Satuan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	Persen	82.50	82.50	76.58
1.1.1		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Persen	82.50	82.50	76.58
1.1.2		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	Persen	75.00	75.00	72.72
1.1.3		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	Point	0.71	0.71	0.78

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Kecamatan Weru Tahun 2024 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel : Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

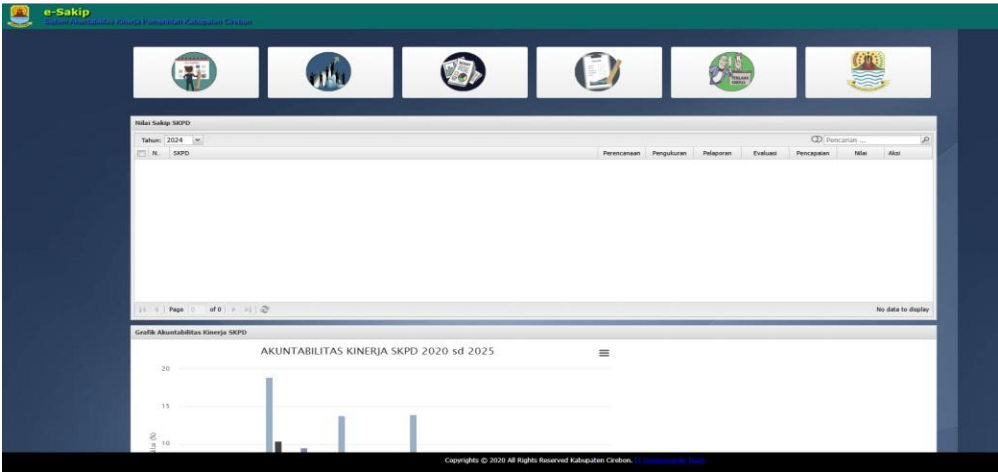
NO	SASARAN STRATEGIS	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Rp.2.792.187.142,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rp.326.860.500,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.0,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.5 Insrtumen Pendukung

2.1 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

- 1. Instrumen Pendukung Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah aplikasi <https://sakup.cirebonkab.go.id/sakup/dashboard> yang digunakan untuk penilaian Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah.

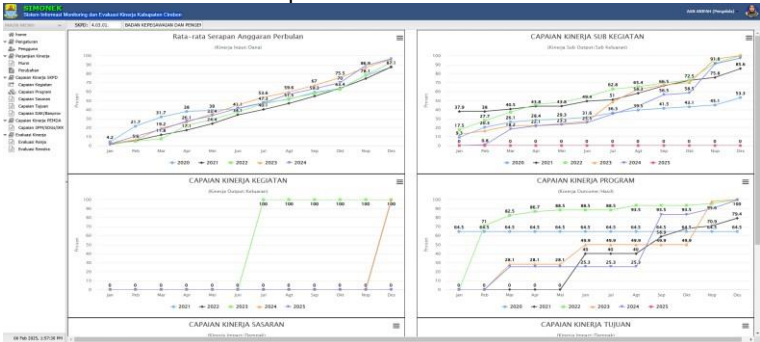
Gambar 2.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon



Sumber: <https://sakup.cirebonkab.go.id/sakup/dashboard>

- 2. Instrumen pendukung capaian kinerja di Badan Kepegawaian Kabupaten Cirebon lainnya yaitu aplikasi SIMONEK (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Cirebon) yang merupakan Aplikasi untuk mengukur capaian kinerja organisasi.

Gambar 2.2 Aplikasi SIMONEK

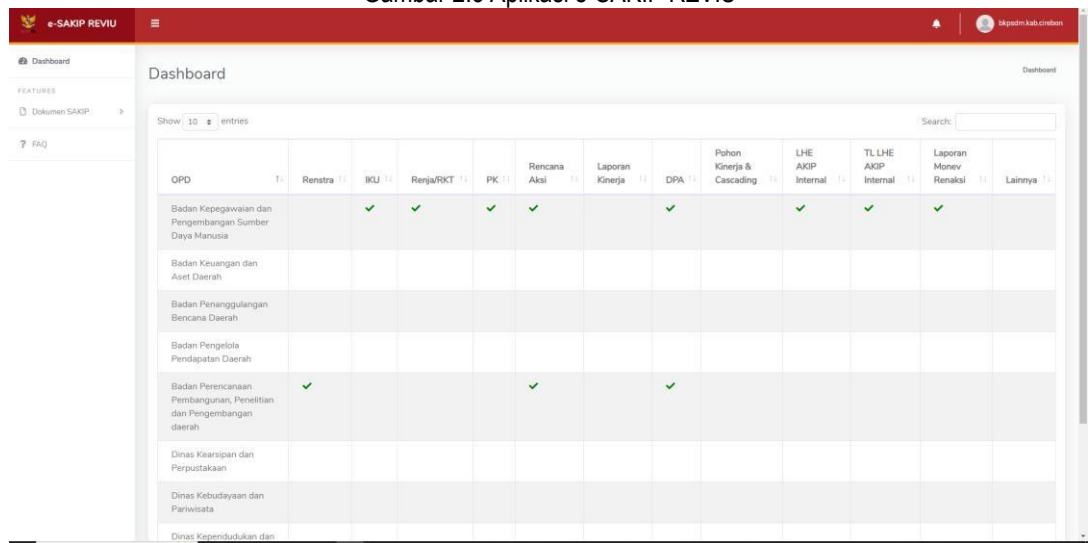


Sumber : <https://simonek.cirebonkab.go.id/dashboard>

- 3. e-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan

sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.

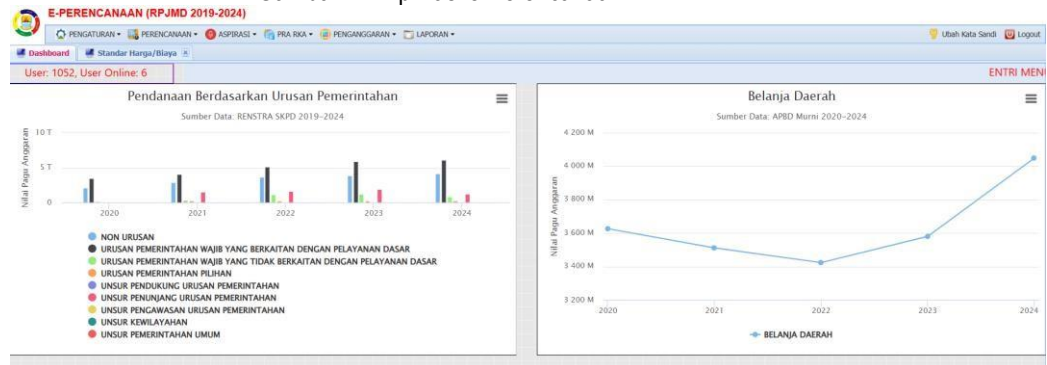
Gambar 2.3 Aplikasi e-SAKIP REVIU



Sumber : <https://esr.menpan.go.id/index.php/home>

4. E-Perencanaan adalah Sistem Aplikasi yang dibangun oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pemerintah daerah. Sistem ini bertujuan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan perencanaan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

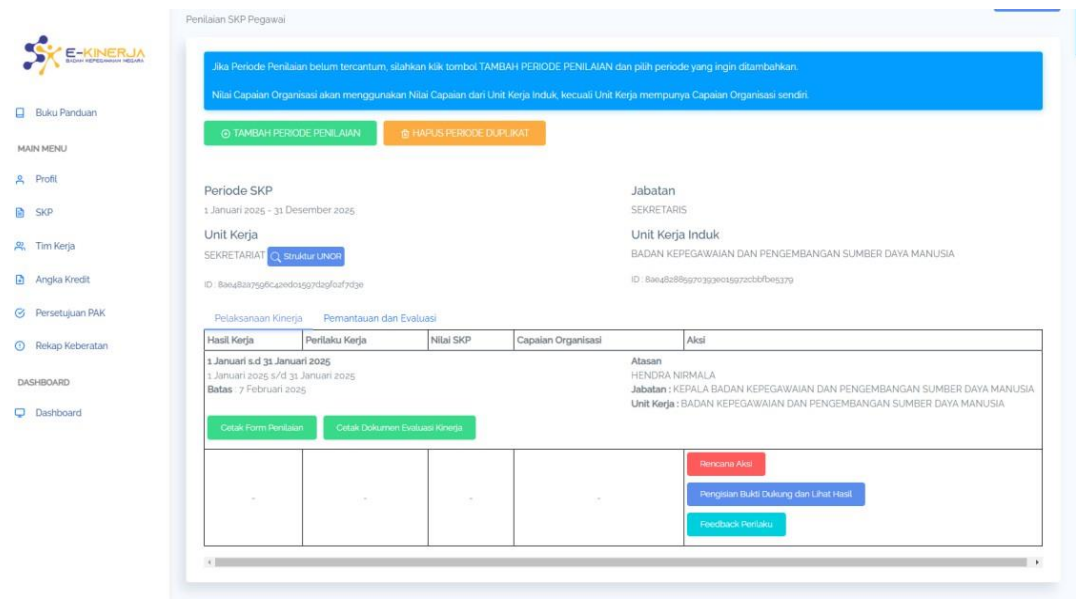
Gambar 2.4 Aplikasi e-Perencanaan



Sumber : <https://perencanaan.cirebonkab.go.id>

5. E-Kinerja BKN adalah Sistem aplikasi yang di bangun oleh Badan kepegawaian Negara sebagai upaya mempermudah pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara. Aplikasi e-Kinerja BKN ini terintegrasi dengan Sistem informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan penilaian kinerja ASN.

Gambar 2.5 Aplikasi e-Kinerja BKN



Sumber : <https://kinerja.bkn.go.id>

6. SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah Sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), aplikasi ini merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola data keuangan, aset dan pelaporan anggaran secara terstruktur dan digital

Gambar 2.6 Aplikasi SIPD Penatausahaan



Sumber : <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan>

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 Berisi :

- 1. Capaian Kinerja Tahun 2024
- 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2024 diperoleh dari evaluasi dan pengukuran data kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati, serta mengacu pada perjanjian kinerja Kecamatan Weru. dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KODE
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$75 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Weru dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Weru beserta target dan capaian realisasinya rincian sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	Realisasi / Kinerja	Capaian %	Nilai Peringkat Kinerja
2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	2.515.370.996	Triwulan IV	2.417.577.469	96,26	Sangat Baik
		82.50 Poin/Nilai	Capaian Komponen Indeks Desa Membangun setiap Desa	3.400	85	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan pemerintahan umum dan ketertiban yang dilaksanakan)	332,739,500	Triwulan IV	322,621,700		Sangat Baik
		75 Poin	Jumlah Kewenangan yang dilaksanakan/Jumlah kewenangan yang di limpahkan x100%	72.72	96.96	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	0	Triwulan IV	0	0	Tinggi
		0.71 Prosen	Capaian Komponen Indeks Desa Membangun setiap Desa	0.78	110.28	

Berdasarkan data pada tabel 3.2, terlihat bahwa capaian sasaran kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat tercapai sebesar 96,26 %, sasaran meningkatkan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban Umum di Kecamatan dengan indikator Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan pemerintahan umum dan ketertiban yang dilaksanakan tercapai sebesar 96.96% (Belum Tercapai) dan sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa tercapai sebesar 110,28% (Tercapai). Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Tujuan/Sasaran, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahun 2023			Target dan Realisasi Tahun 2024			Target dan Realisasi Akhir Renstra Tahun 2024			Perbandingan Realisasi Renstra dengan RPJMD	
			Target	Realisasi	Capain	Target	Realisasi	Capain	Target	Realisasi	Capain		C
1	2	3	4			5			6			7	
1.1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	78.00 %	78.00 %	100%	79 %	79 %	100 %	79 %	79 %	100 %		
1.1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	81%	81.50%	100%	82 %	82 %	100 %	82 %	82 %	100 %		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah	100 %	99.52 %	99.52 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
1.1.2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	70.00 %	70 %	100 %	75 %	75 %	100 %	75 %	75 %	100 %		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Program Pemberdayaan	Prosentase Peningkatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

	Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilakukan											
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	100 %	0 %	0%	100 %	0 %	0%	100 %	0 %	0%		
1.1.3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	0,70	0,80	114 %	0,72 Point	0,81 Point	111 %	0,72 Point	0,81 Point	111 %		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	100 %	0 %	0%	100 %	0 %	0%	100 %	0 %	0%		

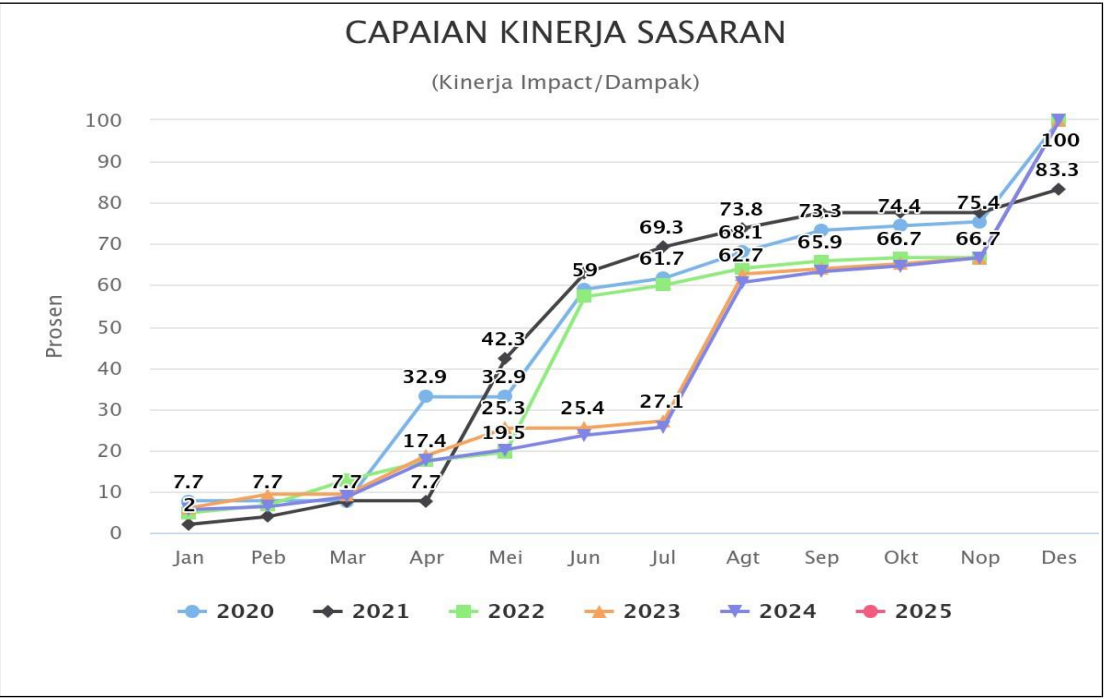
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Weru yang direpresentasikan ke dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1

3.2.1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Publik menggunakan Parameter wajib yang digunakan untuk mengukur tingkat Kepuasan masyarakat dalam pelayanan yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan Survai Kepuasan Masyarakat (IKM) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan cara ini, masyarakat diberikan kesempatan mengevaluasi kualitas pelayanan yang diselenggarakan suatu unit kerja.Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih (clean goverment) dan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah : partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan menjadi hal penting dalam penciptaan iklim birokrasi yang sehat. dalam konteks pembangunan sistem administrasi Negara. Reformasi birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.di bawah ini adalah Grafik Capain Kinerja Sasaran Kinerja Kecamatan Weru dari Tahun 2020 - 2024. dimana salah satu indikator sasaran kinerja yaitu Meningkatkan Indeks Kepauasan Masyarakat.



Tolok ukur capaian sasaran Menigkatnya Kualitas Pelayanan Publik diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan masyarakat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel : Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Sasaran Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Hasil survai Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2023	2024		% Capaian
			Target	Realisasi	
Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Hasil survai Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku	81,50%	82 %	82 %	100%

Dari table diatas diperoleh angka kenaikan sasaran setrategis dari Tahun 2023 dengan angka capaian kinerja 81.50 % dan meningkat pada Tahun 20234 dengan angka capaian 82 % yang sesuai dengan target kinerja pada Renstra KecamatanWeru Tahun 2019-2024.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah Rumus indikator kinerja Program Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah dengan menggunakan rumus :

Jumlah Pelayanan yang disediakan

Rumus = x 100 %

Jumlah Pelayanan yang dibutuhkan

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 1 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

Solusi:

- 1. Menganggarkan belanja untuk sarana dan prasarana palayana umum
- 2. Mengusulakan tambahan petugas pelayanan umum yang berstaus ASN ke BKPSD kabupaten Cirebon

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Keberhasilan indikator Kinerja pada sasaran 1 (satu) di dukung oleh 1 (satu) program yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 (lima) kegiatan, dimana kegiatan tersebut sangat mendukung terhadap pencapaian kinerja baik program ataupun sasaran, berikut merupakan tabel analisa efesiensi penggunaan sumber daya :

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Meningkatka n Indeks Kepuasan Masyarakat.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	100	Rp2.398.599.700,00	Rp2.322.169.358,00	96.81	3,09 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100	Rp 1.541.700,00	Rp 1.541.700,00	100,00	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100	Rp 2.171.513.700,00	Rp 2.110.244.866,00	97,18	2,82
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Laporan	11 Laporan	100	Rp 2.171.513.700,00	Rp 2.110.244.866,00	97,18	2,82
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100	Rp32.443.200,00	Rp32.443.200,00	100,00	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100	Rp 142.371.200,00	Rp 140.266.400,00	98,52	1,48



Gambar, Foto Pelayanan Umum kecamatan Weru Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN 2

3.2.2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan letak dan kondisi geografis daerah perlu memaksimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam melaksanakan pelayanan publik Kecamatan mempunyai peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan Desa. tugas itu meliputi fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dituangkan dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mempunyai peran :

1. Mengevaluasi Peraturan Desa : Rancangan Peraturan APB Desa, Pungutan Desa, Tata Ruang, dan organisasi Pemerintah Desa. Camat mempunyai waktu 20 hari terhitung sejak diterimanya Perdes untuk dievaluasi.
2. Klarifikasi terhadap Peraturan Desa, Perdes yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diklarifikasi dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterimanya Perdes.
3. Menjaga Kondusifitas wilayah di Kecamatan
4. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban di wilayah kecamatan.

Camat juga melakukan koordinasi pendampingan dalam penyusunan perencanaan desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh komponen atau elemen masyarakat dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan mengelola sumber daya desa untuk tujuan kesejahteraan bersama. Tim penyusun RPJMDes melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten supaya sinergis. Penyelarasan dilakukan dengan jalan mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan sekurangnya : RPMJD Kabupaten, rencana strategis OPD, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rincian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan rencana pembangunan kawasan.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	Jumlah Kewenangan yang dilimpahkan / jumlah keweangan yang dilaksanakan x 100 persen.

Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2022	2024		% Capaian
			Target	Realisasi	
Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Jumlah Kewenangan yang dilimpahkan / jumlah keweangan yang dilaksanakan x 100 persen.	70 %	75,00 %	75,00 %	100 %

Capaian indikator kinerja Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2023, hal ini sesuai dengan target pada Renstra kecamatan Weru Tahun 2019- 2024, keniakan capaian kinerja tersebut didukung dengan capain kinerja program yang rata rata capaiannya 100 % pada Tahun 2024, berikut adalah data capaian kinerja program.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program dalam mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan terdiri dari 4(empat) program yang sudah ditetapkan dalama dokumen rencana strategis kecamatan Weru tahun 2019-2024, program tersebut diantaranya :

NO	Program	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayana Publik	Prosentase PeningkatanEfektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilakukan}}{\text{Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Direncanakan}} \times 100\%$
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilakukan	$\frac{\text{jumlah pemberdayaan desa (desa mandiri)}}{\text{jumlah total desa sekecamatan}} \times 100\%$

3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang di rencanakan}} \times 100\%$
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang ditugaskan}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum seluruhnya}} \times 100\%$

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Keberhasilan indikator Kinerja pada sasaran 2 (dua) didukung oleh 4 (empat) program yaitu dan 6 (enam) kegiatan, dimana kegiatan tersebut sangat mendukung terhadap pencapaian kinerja baik program ataupun sasaran, berikut merupakan tabel analisa efesiensi penggunaan sumber daya:

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100	100 %	Rp 143.149.400,00	Rp 135.008.000,00	94,31	5,69
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	Rp 26.003.400,00	Rp 25.722.000,00	98,92	1,18
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Laporan	4 Laporan	100 %	Rp 93.104.000,00	Rp 85.604.000,00	91,94	8,06
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	Rp 90.908.100,00	Rp 89.408.100,00	98,95	1,05

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 Laporan	3 Laporan	100 %	Rp 90.908.100,00	Rp 89.408.100,00	98,95	1,05
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	Rp98.682.000,00	Rp98.205.600,00	99,52	0,48
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Laporan	3 Laporan	100 %	Rp50.119.800,00	Rp49.896.600,00	99,55	0,45
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100 %	Rp48.562.200,00	Rp48.309.000,00	99,48	0,52

Ada beberapa Faktor Dalam rangka menunjang indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Weru pada Tahun 2024 diantaranya:

Faktor Pendorong:

1. Adanya Undang–Undang yang mengatur secara khusus tentang Pemerintahan Desa yaitu Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Adanya Peraturan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa sebagai sumber dana yang di Kelola oleh Pemerintah Desa
3. Adanya Aset Desa yang bisa dikelola sebagai Pendapatan Asli Desa

Faktor Penghambat:

1. Terbatasnya Kualitas SDM Apartur Desa
2. Apartur di desa banyak yang belum memahami Peraturan tentang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
3. Tidak tertibnya Pencatatan Administrasi Aset Desa.

Tindak Lanjut:

1. Rekrutmen Aparatur Pemerintahan Desa harus di utamakan bagi perngakat desa yang mempunyai pengetahuan dan mempuyai keahlian dalam administrasi perkantoran.
2. Mengadakan Sosialisasi tentang Pertuaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3. Pembinaan dan Fasiltasi tentang Pencatatan Aset Desa.

	
Foto Bimbingan Teknis Penelolaan Keuangan Desa Tahun 2024	Foto Monev Bantuan Keuangan Desa Tahun 2024
	
Sosialisasi Peraturan Tentang Desa Tahun 2024	Rapat Internal Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN 3

3.2.3. Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni :

- 1. Indeks Ketahanan Sosial,
- 2. Indeks Ketahanan Ekonomi dan
- 3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks desa Membangun, Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	Capaian Komponen Indeks Desa Membangun setiap Desa

Kecamatan Weru dalam hal ini sangat berperan penting dalam menentukan status desa, pada Tahun 2024 Kecamatan Weru ada 2 (dua) Desa yang berstatus mandiri, dan 7 (tujuh) Desa yang berstatus maju.

Kinerja sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2023	2024		% Capaian
			Target	Realisasi	
Indeks Desa Membangun (IDM).	Capaian Komponen Indeks Desa Membangun setiap Desa	0.80 Poin	0.72	0.81	111 %

IDM Kecamatan Weru pada tahun ke tahun mengalami kenaikan, data tersebut di dapatkan dari pendamping desa yang bertugas di desa se wilayah kecamatan Weru dimana pada Tahun 2024 target 0.72 poin tecapai 0.81 poin dengan angka capaian 111 % dan masuk dalam kategori di tingkat kecamatan dengan katagori maju.

Kategor Desa bisa masuk kategori mandiri memiliki nilai IDM ≤0,8581 dan > 0,8359 Desa maju memiliki nilai IDM ≤0,8143 dan >0,7597.



Foto Kegiatan Peningkatan Status Desa Membangun (IDM) Tahun 2024

Foto Kegiatan Peningkatan Status Desa Membangun (IDM) Tahun 2024

Berikut ini ada Data Indeks Desa Membangun Kecamatan Weru pada Tahun 2024

KODE PROV	KODE KAB	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	VERIFIKASI			STATUS	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	Rata rata	STATUS IDM 2024
						KEC	KAB	PROV						IDM Kec	
32	3209	320919	WERU	3209192004	MEGU CILIK	1	1	0	verified	0.9429	0.8333	0.6667	0.8143	0.7831	MAJU
32	3209	320919	WERU	3209192005	SETU WETAN	1	1	0	verified	0.8629	0.6833	0.8667	0.8043	Maju	MAJU
32	3209	320919	WERU	3209192006	SETU KULON	1	1	0	verified	0.8743	0.7667	0.8667	0.8359		MANDIRI
32	3209	320919	WERU	3209192007	WERU KIDUL	1	1	0	verified	0.7886	0.8667	0.6	0.7517		MAJU
32	3209	320919	WERU	3209192008	WERU LOR	1	1	0	verified	0.8743	0.9	0.8	0.8581		MANDIRI
32	3209	320919	WERU	3209192009	TEGALWANGI	1	1	0	verified	0.8229	0.7667	0.6667	0.7521		MAJU
32	3209	320919	WERU	3209192001	KARANGSARI	1	1	0	verified	0.8057	0.8	0.6	0.7352		MAJU
32	3209	320919	WERU	3209192002	KERTASARI	1	1	0	verified	0.7943	0.75	0.6667	0.737		MAJU
32	3209	320919	WERU	3209192003	MEGU GEDE	1	1	0	verified	0.8457	0.8333	0.6	0.7597		MAJU

Pada Tahun 2024 indikator Kinerja sasaran Indeks Desa Membangun (IDM) tidak didukung oleh anggran dan tidak mempunyai target kinerja, hal ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian sasaran yang telah di tetapkan, dengan komitmen dari pegawai kecamatan Weru sehingga target kinerja tersebut bisa tercapai secara keseluruhan desa yang ada diwilayah kecamatan Weru IDM Kecapatan weru memperoleh nilai 0,7831 dengan kategori maju. hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor.

Ada beberapa Faktor dalam rangka menunjang indikator sasaran Indeks Desa Membangun di Kecamatan Weru pada Tahun 2024 dianataranya:

Faktor Pendorong:

- 1. Kecamatan Weru di tetapkan sebagai pusta kegiatan lokal dari pemerintah kabupaten Cirebon
- 2. Adanya Petugas pendamping Desa di setiap desa untuk menilai status Desa
- 3. Koordinasi yang yang baik antara Pemerintahan Desa dengan Kecamatan

Faktor Penghambat:

- 1. Terbatasnya Kualitas SDM Apartur Desa
- 2. Rendahnya pemahaman aparatur Desa tentang Desa membangun
- 3. Kurangnya dukungan masyarakat tentang pemberdayaan di desa

Tindaklanjut :

- 1. Mengadakan Bimbingan Teknis tentan Desa Membangun
- 2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Musrenbang ditingkat kecamatan
- 3. Mendorong Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan Infarstuktur di desa.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program dalam mendukung sasaran Indeks Desa Membangun terdiri dari 1 (satu) program yang sudah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis kecamatan Weru tahun 2019-2024, progam tersebut adalah:

NO	Program	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan}}{\text{Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan}} \times 100$

Pada Tahun 2024 Indikator kinerja peningkatan persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa tidak didukung oleh anggaran, hal ini semata mata karena selahan dari perencanaan pada Tahun 2024.

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Indeks Desa Membangun (IDM).	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	0	0 %	Rp0	Rp0	0	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Laporan	0 Laporan	0 %	Rp0	Rp0	0	

BAB 4
PENUTUP

Bab 4 Berisi :

- 1. Kesimpulan
- 2. Langkah Perbaikan Kinerja

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan pada Kecamatan Weru Tahun 2024 merupakan tahun ke 5 (Lima) dari Rencana Strategis Kecamatan Weru Tahun 2019-2024, Keberhasilan yang di capai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. hasil laporan kinerja Kecamatan Weru Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari 3 sasaran, yaitu yang pertama Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikatornya Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 82 %, yang kedua Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan, dengan indikatornya persentasi jumlah pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan umum dan ketertiban umum yang dilaksanakan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 75 %, dan yang ketiga Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikatornya Indeks Desa Membangun (IDM), Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 0.81 Ponit.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja. Langkah- langkah perbaikan yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat
- 2. Menganggarkan sarana dan prasarana pelayanan umum
- 3. Memperbaiki Bangunan / Gedung kantor
- 4. Meningkatkan kemampuan ASN melalui Bimtek atau Pelatihan
- 5. Memperbaharui SOP Pelayanan Umum
- 6. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7. Melaksanakan Pembinaan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Apartur Pemerintahan Desa
8. Meningkatkan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
9. Mengadakan Sosialisasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022 tentang tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
10. Meningkatkan Keamanan di wilayah Kecamatan
11. Mendorong peningkatak Status Desa menjadi Desa Mandiri
12. Melakukan Pembinaan bagi Peserta MTQ tingkat Kabupaten
13. Memperkuat Fungsi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)

Melalui Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Weru diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kinerja Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon untuk Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya LKjIP Kecamatan Weru ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi unit kerja lain khususnya Kecamatan Weru untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai program-program kegiatan pada masa yang akan datang sesuai dengan yang dicita-citakan pada visi, misi dan strategi/kebijakan organisasi.

Semoga LKjIP Kecamatan Weru diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon.

Weru, Februari 2025

CAMAT WERU,



HEVAZI ALDAHARY, S.Sos, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19781207 200902 1 001